



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DI INDONESIA**Ferdi Yulistian Anwar¹, Erni Febrina Harahap^{2*}**^{1,2} Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Bung Hatta*Corresponding author: ¹ferdiyulistian401@gmail.com ^{2*}ernifebrinaharahap@bunghatta.ac.id

Abstract

Capital expenditures are expenditures whose benefits tend to exceed one year and will increase government assets or wealth, which will then increase the routine budget for operational costs and maintenance costs. This research aims to determine the effect of BUMD profits, General Allocation Funds and the number of MSMEs on capital expenditure in 34 provinces in Indonesia for the 2017-2021 research period. This research uses panel data regression with 170 observations, passes the classical assumption test and uses the Fixed Effect Model (FEM). This research shows that there is a positive relationship between BUMD profits, general allocation funds and capital expenditure in 34 provinces in Indonesia. Meanwhile, the number of MSMEs has a negative relationship with capital expenditure.

Keywords: capital expenditure, BUMD profits, DAU, number of MSMEs**Abstrak**

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba BUMD, Dana Alokasi Umum dan Jumlah UMKM terhadap Belanja Modal di 34 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan 170 observasi, lolos dari uji asumsi klasik dan menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara laba BUMD, Dana alokasi umum terhadap belanja modal di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan Jumlah UMKM memiliki hubungan negatif terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Laba BUMD, DAU, Jumlah UMKM**Informasi Artikel**

Diterima : 22/04/2024

Review Akhir : /05/2024

Diterbitkan online : 06/2024

Pendahuluan

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun yang sama. Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan mafaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian, dengan modal daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dan laba BUMD juga mempengaruhi belanja modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Selain

itu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang memiliki kesempatan yang luas karena berada di berbagai sektor ekonomi baik pertanian maupun non pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi (Prasetyo, 2018). Semakin banyak UMKM yang berkembang di suatu wilayah maka semakin besar kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, dan juga sangat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh laba BUMD, Dana Alokasi UMUM, dan jumlah UMKM terhadap belanja modal di Indonesia.

Kajian Pustaka

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya (Kusnandar, 2012). Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Badan Usaha Milik Daerah yang juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan meningkatkan profesionalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya (Hadi, 2017). Adanya belanja daerah akan memajukan daerah dan berperan dalam kegiatan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, semakin banyak Laba BUMD akan semakin banyak juga manfaatnya asalkan dimanfaatkan bagi kepentingan yang benar untuk memajukan daerahnya.

Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004). Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber

pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari APBN yang mempunyai tujuan khusus. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang jelas memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, tentunya akan menjadi prioritas atau komitmen dari pemerintah untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan UMKM ini melalui beberapa program kerja pemerintah tersebut. Hal ini tentunya memerlukan ketersediaan anggaran belanja yang cukup besar yang sinkron dengan jumlah dan porsi UMKM itu sendiri. Pelatihan, bimbingan dan perhatian terhadap industri kecil dapat meningkatkan daya saing apalagi industri tersebut menopang perekonomian daerah dan banyak bermanfaat dalam meningkatkan industri pariwisata yang sedang digalakkan pemerintah melalui budaya dan kekayaan lokal (Harahap, 2023). Dan hal ini juga mendorong produk ekspor dalam perdagangan internasional dengan daya saing tinggi (Harahap, 2024). Laba Badan Usaha Milik Daerah memerlukan ketersediaan anggaran belanja yang cukup besar yang sinkron dengan jumlah dan porsi UMKM itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebagian data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang merupakan penggabungan dari data *cross section* yang dikumpulkan dari 34 provinsi dengan data *time series* yaitu selama periode 2017-2021, sehingga terdapat 170 observasi dan diolah menggunakan Eviews 10. Regresi data panel memiliki tiga kemungkinan model yang dapat digunakan yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Gujarati dan Potter, 2013). Pada penelitian ini model yang digunakan adalah *fixed effect* model karena model ini yang paling sesuai setelah dilakukan uji Chow, Hausman dan LM test. Adapun model yang digunakan adalah :

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 LBUMD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 JUMKM_{it} + \mu_{it} \dots \quad (1)$$

Dimana : BM = Belanja Modal; LBUMD = Laba BUMD; DAU = Dana Alokasi Umum; JUMKM = jumlah UMKM; β_0 = konstanta; $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi ; i = provinsi ; dan t = waktu. Model ini sebelumnya diuji dengan beberapa asumsi klasik yang sudah terpenuhi seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil pengolahan data dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut,

UJI FEM

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel Least Squares

Date: 12/21/23 Time: 02:43

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.77402	0.902889	21.90084	0.0000
LOGX1	0.005405	0.122349	0.044178	0.9648
LOGX2	0.087660	0.032125	2.728703	0.0072
LOGX3	-0.101623	0.045594	-2.228874	0.0275

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.977475	Mean dependent var	20.54482
Adjusted R-squared	0.971379	S.D. dependent var	0.610256
S.E. of regression	0.103242	Akaike info criterion	1.513630
Sum squared resid	1.417646	Schwarz criterion	0.831133
Log likelihood	165.6585	Hannan-Quinn criter.	1.236680
F-statistic	160.3239	Durbin-Watson stat	2.202588
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dianalisis sebagai berikut: Laba Badan Usaha Milik Daerah mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Indonesia, Hal ini dibuktikan p-value (0.96485) > $\alpha = 0.05$. dengan nilai koefisien regresi variabel Laba Badan Usaha Milik Daerah sebesar 0.005405 artinya jika Laba Badan Usaha Milik Daerah naik besar 1 persen dan variabel yang lain tetap, maka Belanja Modal meningkat sebesar 0.005405 persen. Hal ini menunjukkan laba BUMD belum berkontribusi penuh untuk meningkatkan belanja modal daerah di setiap tahunnya. Nilai yang disetorkan oleh BUMD masih tergolong kecil untuk dapat menopang belanja modal daerah. Harapan pemerintah ialah BUMD terus berupaya mengembangkan sektor-sektor usahanya untuk mencari keuntungan dan mensejahterakan warga yang menjalankan UMKM serta agar dapat memberikan setoran deviden dengan angka yang tinggi sehingga BUMD dapat melaksanakan tujuan utamanya membantu meningkatkan pendapatan asli daerah demi terciptanya kemandirian daerah sesuai program yang direncanakan. Sementara untuk Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan positif dan

signifikan terhadap Belanja Modal di Indonesia, Hal ini dibuktikan p-value (0.0072) $< \alpha = 0.05$, dengan nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0.087660 artinya jika Dana Alokasi Umum naik besar 1 persen dan variabel yang lain tetap, maka Belanja Modal meningkat sebesar 0.087660 persen, selanjutnya untuk Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Indonesia, Hal ini dibuktikan p-value (0.0275) $< \alpha = 0.05$. dengan nilai koefisien regresi variabel Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar -0.101623 artinya jika Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah naik besar 1 persen dan variabel yang lain tetap, maka Belanja Modal menurun sebesar 0.101623 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah UMKM yang lebih besar cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk belanja modal guna mendukung perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM biasanya merupakan penyedia lapangan kerja yang besar di suatu daerah. Dengan meningkatnya jumlah UMKM, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan modal belanja untuk mendukung pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan bagi pekerja UMKM, serta promosi produk-produk UMKM agar dapat diakses lebih banyak konsumen (Harahap, 2020). Pertumbuhan jumlah UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Dengan demikian, meningkatnya daya beli masyarakat juga dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan usaha local, dan harus mempertimbangkan agar kegiatan ini dapat berlanjut dalam waktu yang lama (sustainable development) (Husain, 2023). Apabila dilihat dari uji F atau uji simultan maka model ini dapat diterima karena signifikan, dimana nilai Fstatistik 160.3239 dan Probabilitasnya 0.0000 yang lebih kecil dari alpha 5 persen.

SIMPULAN

Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel laba BUMD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan perlu usaha lebih ekstra dalam meningkatkan laba BUMD agar memberikan kontribusi kepada belanja modal dengan memberikan motivasi dan pelatihan-pelatihan kepada beberapa usaha milik daerah. Untuk variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Indonesia di tahun penelitian, dan variable Jumlah UMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, D., N., Porter, C., D. 2013. *Dasar Ekonometrika*. Terjemahan Mardanugraha, E., Wardhani, S., Mangunsong, C. Salemba Empat, buku 1 edisi 5, Jakarta.
- Harahap, Erni Febrina, Luviana, Nurul Huda (2020). Defisit Fiskal, Ekspor, Impor Dan Jumlah UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 151-161.
- Harahap, Erni Febrina, dkk (2023). The Competitiveness of the Tourism Industry in West Sumatra with a Competitiveness Monitor Approach; in The Third ELEHIC, 23-24 November 2022. P.199–206. DOI 10.18502/kss.v8i13.13757. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/13757/22257>. The article was published on Mon, 24 Jul 2023.
- Harahap, Erni Febrina, dkk (2024). Using Support Vector Machines for Classification Datamining on International Trade Price Index Data. International Conference on Environmental, Mining, and Sustainable Development 2022 AIP Conf. Proc. 3001, 110001-1–110001-8; <https://doi.org/10.1063/5.0183902>. Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4850-6/\$30.00. 110001-1 - 110001-8. RESEARCH ARTICLE | FEBRUARY 21 2024.
- Hadi, I. (2017). Pengaruh Laba BUMD, Pajak Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal (*Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*).
- Husain, Muhammad Najib, Erni Febrina Harahap, dkk (2023). The sustainability development dilemma in green public relations: part of CSR failure? *Jurnal Studi komunikasi* Vol 7; Ed 3, Nov 2023, P. 759-778. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i3>
- Kusnandar, Dodik Siswanto. (2012). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Universitas Indonesia. Jakarta (2012).
- Nuarisa, Sheila Ardhan. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Analysis Journal* 2.1
- Prasetyo, A. E., & Farichah, F. (2018). Pengaruh Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 19(2), 206-220.